



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.6.1/Kep.- 136 Dinkop UKM/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) Lembar

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2025-2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, terukur, dan berkelanjutan diperlukan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah yang sinergis, selaras dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, daerah dan dengan kabupaten/kota yang berbatasan;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon berakhir pada tahun 2024 bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon periode 2019-2024 dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon yang baru akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024 sehingga perlu adanya penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah;
- c. Bahwa dalam rangka akurasi penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 136);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

- Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Seri E.5);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);
  23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 149 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 149);
  24. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 165).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk :
  - a. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi terkait:
    - 1) Data sumber daya manusia pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon baik PNS PPPK maupun non ASN;
    - 2) Data laporan keuangan tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon selama 5 (lima) tahun terakhir termasuk data asset atau barang modal yang dimiliki;

data asset atau barang modal yang dimiliki;

- 3) Data capaian kinerja pelayanan perangkat daerah terutama realisasi capaian indikator Standar Pelayanan Minimal, data realisasi indikator SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, data realisasi indikator kinerja kunci urusan pemerintahan lima tahun terakhir; dan
  - 4) Data dokumen Renstra Kementerian/ lembaga yang terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, data dokumen Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, dokumen RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038, data hasil KLHS, rancangan akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;
- b. Menginventarisir, mempelajari dan menerapkan peraturan perundang-undangan (baik undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dalam negeri, peraturan menteri teknis, peraturan daerah, peraturan bupati) yang terkait perencanaan pembangunan, penganggaran daerah dan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya;
  - c. Mempelajari dan mengimplementasikan panduan atau petunjuk teknis terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah;
  - d. Menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  - e. Menyusun Rancangan awal Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025-2026;
  - f. Melaksanakan Forum Organisasi Perangkat Daerah untuk membahas rancangan Rencana Strategis Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  - g. Menyusun Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025-2026;
  - h. Menyampaikan rancangan akhir Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025-2026 kepada Kepala Bappelitbangda untuk dilakukan verifikasi;
  - i. Memperbaiki dan menindaklanjuti saran dan rekomendasi dari Bappelitbangda untuk penyempurnaan rancangan akhir Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025-2026; dan
  - j. Melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

KETIGA : Tim Penyusun menyampaikan rancangan akhir Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025-2026 kepada kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Cirebon untuk dilakukan verifikasi.

- KEEMPAT : Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Cirebon menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025-2026, maka Tim Penyusun harus memperbaiki dan menindaklanjuti rekomendasi dimaksud.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 23 Maret 2024

**BUPATI CIREBON,**

  
**IMRON**

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Cirebon; dan
3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 000.7.6.1/Kep. - 136 Dinas Koperasi UKM/2024  
TANGGAL : 28 Maret 2024  
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2026

#### SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2026

Penanggung jawab : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon

Ketua Tim : Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon

Sekretaris Tim : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Kelompok Kerja : a. Sekretariat  
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
2. Susilawati, S.IP  
3. Etik Noorjannah, S.Sos.  
4. Wiwit Juwita Komalawati, S.Sos, M.Si  
5. Rio Perdiansyah Saputro

b. Bidang Koperasi

1. Kepala Bidang Koperasi  
2. Pengawas Koperasi Ahli Pertama  
3. Pengawas Koperasi Ahli Muda  
4. Adi Mardian Nur, S.Kom

c. Bidang Usaha Mikro

1. Kepala Bidang Usaha Mikro  
2. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda  
3. Andri Dermawan S.E

**BUPATI CIREBON,**



**IMRON**



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
Alamat : Jl. Sunan Drajat No. 13 Kompleks Perkantoran Sumber Telp./Fax (0231) 321775  
SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 2 Februari 2029  
Nomor : 5454 / Sekre 2029  
Sifat : Sangat Penting  
Lampiran : 1 ( satu ) berkas  
Perihal : Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusun Rencana Strategis  
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon, kami mohon Bapak Bupati Cirebon berkenan untuk menetapkan Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026.

Demikian Nota Dinas ini dibuat untuk menjadi bahan pertimbangan dan sebagai upaya meningkatkan pelayanan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil  
dan Menengah Kabupaten Cirebon,



Drs. H. DADANG SUHENDRA, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670410 199301 1 001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bappelitbangda Kab. Cirebon